

### **PENDIDIKAN DI KSATRIAN INSTITUUT (1924-1941)**

Laode M.K. Mondolalo  
Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta  
e-mail: boneka.bulan@gmail.com

**Abstrak-** Kesatrian Instituut merupakan salah satu lembaga swasta penyelenggara pendidikan pada masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan di sekolah-sekolah milik yayasan Ksatrian Instituut memberikan warna yang menarik dalam sejarah pendidikan Indonesia. Seperti kebanyakan sekolah partikelir di jamannya, sekolah-sekolah Ksatrian Instituut menerapkan sistem yang berbeda dengan sekolah yang dikelola pemerintah Hindia-Belanda. Berbagai macam model sekolah dikembangkan oleh Ksatrian Instituut berdasarkan visi dan tuntutan jaman saat itu. Pendidikan ketreampilan khususnya dalam kewirausahaan sangat menonjol dalam pendidikan di Ksatrian Instituut. Sayangnya, sebagai sekolah yang ditujukan untuk kalangan bumiputra, akses pendidikan ke Ksatrian Instituut cukup sulit terutama soal biaya pendidikan.

**Kata kunci:** *Pendidikan, Pendidikan Masa Kolonial Belanda, Ksatrian Instituut.*

### **EDUCATION IN KSATRIAN INSTITUUT (1924-1941)**

Laode M.K. Mondolalo  
Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta  
e-mail: boneka.bulan@gmail.com

**Abstract-** Kesatrian Instituut is one of the private institutions of education during the reign of the Dutch East Indies government. Education in schools belonging to the Ksatrian Instituut foundation provides an interesting color in the history of Indonesian education. Like most private schools of its time, the Ksatrian Instituut schools adopted a system different from that of the Dutch East Indies government. Various school models were developed by Ksatrian Instituut based on the vision and demands of the time. Skill education especially in entrepreneurship is very prominent in education at Ksatrian Instituut. Unfortunately, as a school aimed at the bumiputra, access to education Ksatrian Instituut quite difficult, especially about the cost of education.

**Keywords:** *Education, Dutch Colonial Education, Ksatrian Instituut.*

## **Pendahuluan**

Benang merah pendidikan Indonesia pada masa Kolonial Belanda telah terputus. Sebelumnya masyarakat bumiputra mengenal sistem pendidikan pesantren pada masa kejayaan kerajaan Islam di Nusantara. Lebih jauh kebelakang, pada masa kerajaan Hindu-Budha, berkembang juga sistem pendidikan padepokan yang mirip dengan pendidikan di pesantren. Tujuan seorang murid datang kepadepokan lebih didasari keinginan untuk menguasai sebuah bidang ilmu ketimbang mencari bekal untuk bekerja. Dari kedua model pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebelum kedatangan Belanda memiliki tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang berakhlak mulia dan memiliki ketrampilan hidup yang baik (Sijpenhof, 2021). Hal ini lah yang hilang dalam pendidikan pada yang diselenggarakan pemerintah Hindia-Belanda.

Kesadaran mengenai perlunya mengembalikan tujuan pendidikan di Indonesia kepada tujuan yang sebenarnya tumbuh diantara tokoh pergerakan nasional (Dewantara, 1967). Suwardi Suryoningrat (Ki Hadjar Dewantara) dan Muhammad Sjafei merupakan contoh tokoh pergerakan yang memakai pendidikan sebagai alat perjuangannya. Suwardi Suryoningrat mendirikan Perguruan Taman Siswa yang menekankan pendidikan budi pekerti dalam sistem pendidikannya. Sedangkan Muhammad Sjafei mendirikan INS Kayu Tanam yang menitikberatkan pada penguasaan berbagai keterampilan sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan (Afdhal et al., 2022; Marjanis, 2021; Perkasa et al., 2021). Kedua sekolah partikelir ini menunjukkan corak pendidikan yang berbeda dengan sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia-Belanda.

Selain kedua sekolah tersebut masih banyak sekolah partikelir lain di Indonesia saat itu yang corak dan tujuan yang sama dengan kedua sekolah tersebut. salah satunya adalah sekolah-sekolah dibawah naungan yayasan Ksatrian Instituut. Yayasan ini didirikan oleh Dr. Danudirja Setiabudi (E.F.E Douwes Deker) di Bandung. Sebelum mendirikan Ksatrian Instituut, Dr. Setiabudi telah berjuang lewat jalur politik menggunakan wadah Indische Partij. Sayangnya Indische Partij mengalami kemunduran dan bubar setelah ditinggal para pemimpinnya termasuk Dr. Setiabudi. Setelah gagal dalam perjuangan politik, Dr. Setiabudi kemudian mengubah arah perjuangannya ke dalam bidang pendidikan dengan mendirikan yayasan Ksatrian Instituut. Yayasan ini merupakan wujud pengabdian Dr. Setiabudi kepada bangsa Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya (Moleong, 2010). target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Kajian Tentang Pendidikan**

Istilah pendidikan secara etimologis merujuk pada kata *paedagogia* dalam bahasa Yunani. *Paedagogia* memiliki arti pergaulan dengan anak-anak. Istilah *paedagogia* berasal dari kata *paid* yang berarti anak dan *agogos* yang berarti membina atau membimbing. *Paedagogia* berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dimaknai sebagai membina dan membimbing anak-anak. Kata *pedagogia* memiliki kedekatan makna dengan kata *pedagogiek* yang berarti ilmu menuntun anak. Kata *paedagogiek* merupakan rujukan dari istilah Ilmu pendidikan (Sukarjo & Komarudin, 2009: 7-8). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, secara sederhana kata *pedagogia/pendidikan* merupakan wujud kongkrit atau aktualisasi dari *pedagogiek/ilmu pendidikan* yang terbatas pada teori dan konsep-konsep. Pendidikan merupakan upaya membina dan membimbing anak dengan ilmu pendidikan sebagai landasan teoritisnya.

Menjadikan seorang anak menjadi dewasa merupakan tujuan pendidikan. Langeveld (Ahmadi & Uhbiyat, 2015: 69) berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya mempengaruhi anak menjadi dewasa. Upaya ini dilakukan dengan sengaja oleh orang dewasa pada anak atau seseorang yang belum dewasa. Dewasa yang dimaksudkan adalah mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam berbagai aspek diri dan hidup. Menjadi dewasa berarti mampu mengambil keputusan sendiri dan siap menerima konsekuensinya. Melalui pendidikan, anak dibantu menjadi lebih trampil dan mandiri dalam hidupnya.

Pendidikan merupakan proses pembangunan kualitas diri seseorang. John Dewey (Hasbullah, 2011: 2) menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan-kemampuan mendasar secara intelektual dan emosional terhadap alam dan sesama manusia. Pendidikan sebagai sebuah proses berarti merupakan upaya berkesinambungan serta dilakukn terus menerus. Kemampuan-kemampuan dasar yang coba dibangun dapat dimaknai sebagai keterampilan hidup yang bermanfaat bagi lingkungan dan orang-orang disekitarnya. Pendidikan dalam pandangan ini merupakan upaya berkesinambungan mengembangkan keterampilan hidup anak yang bermanfaat secara menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan diatas, pendidikan dapat dimaknai sebagai proses pendewasaan anak secara individu maupun sosial. Hal ini senada dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara (2004: 20) yang menyatakan, “pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.” Pendidikan merupakan suatu tuntunan yang berarti hanya mampu untuk memandu suatu proses. Pertumbuhan dan perkembangan anak berada diluar kendali dan kuasa pendidikan. Sejak lahir seorang anak telah memiliki kodratnya sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Kodrat yang dimaksud adalah nilai-nilai positif yang dimiliki oleh seorang manusia ketika lahir. Pendidikan dengan melihat kenyataan yang demikian hanya dapat memandu perkembangan anak agar sesuai kodratnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, pendidikan secara umum memiliki beberapa poin penting yang dapat diermati. Pendidikan merupakan aktivitas interaktif yang dilakukan secara sadar dan terencana. Pendidikan dilakukan oleh fasilitator dan dinamisator terhadap subjek pendidikan yang berupaya mengembangkan diri. Proses pendidikan dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Terdapat suatu nilai sebagai dasar aktivitas pendidikan. Kegiatan pendidikan memiliki tujuan positif dalam rangka mengembangkan seluruh potensi subjek pendidikan. Tujuan akhir pendidikan adalah kedewasaan subjek pendidikan secara fisik, psikologi, sosial, emosional, ekonomi, moral, dan spiritual ((McCowan, 2023); Rohman, 2009: 10).

## **B. Pendidikan Masa Kolonial Belanda**

Keruntuhan VOC menyebabkan kekuasaan di Indonesia/Hindia Belanda beralih ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda dalam berbagai bidang kehidupan Bangsa Indonesia termasuk dalam bidang pendidikan (Fachrurozi, 2019; Setiawan, 2018; Susilo & Isbandiyah, 2018). Pemerintah kolonial Belanda membawa sistem pendidikan moderen yang lebih mapan untuk seluruh masyarakat di negeri jajahannya termasuk untuk anak-anak Indonesia. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda diwujudkan dalam bentuk mendirikan berbagai macam sekolah untuk berbagai golongan dan tingkat sosial.

Sekolah yang paling awal berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda adalah Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua. Sekolah Kelas Satu diperuntukan untuk anak-anak Indonesia dari golongan priyayi dan orang-orang kaya. Sekolah Kelas Dua, diperuntukan untuk anak-anak Indoensia dari masyarakat biasa. Sekolah Kelas Dua ini diselenggarakan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah pemerintah. Khusus anak-

anak Indonesia di desa, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan *Volkscholl* (sekolah desa) (Afandi et al., 2020; Prayudi & Salindri, 2015). Pendirian *Volkschool* diserahkan pada masyarakat lokal di pedesaan yang ingin menyelenggarakannya. Lulusan *Volkschool* selanjutnya dapat melanjutkan pendidikan di *Vervolgschool*. Sistem sekolah lanjutan ini diperkenalkan sebagai upaya penyetaraan lulusan *Volkschool* dengan lulusan Sekolah Kelas Dua.

Anak-anak Belanda memiliki sekolah khusus yang diperuntukan bagi mereka. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) sebagai wadah pendidikan anak-anak Belanda. Setelah lulus dari HIS, siswa yang berprestasi dan memiliki keuangan yang baik dapat melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager School*) setingkat SMP. Lulus dari MULO kemudian dapat disambung dengan AMS (*Algemeene Middelbare School*). Lulusan AMS yang berprestasi dan memiliki minat belajar yang tinggi dapat melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi. Selain MULO dan AMS ada sekolah MBS (*Hoogere Burgerschool*) dan sekolah-sekolah vokasi seperti STOVIA (Sekolah Dokter Hindia), sekolah teknik pertukangan, dan *Kweekschool*. *Kweekschool* merupakan sekolah yang diselenggarakan untuk mendidik para calon guru.

Sistem pendidikan untuk anak-anak Belanda memang lebih baik dari pada pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Meskipun demikian, peluang bagi anak-anak Indonesia masuk ke sistem pendidikan anak-anak Belanda masih terbuka. Tahun 1924, lulusan dari Sekolah Kelas Satu dan Dua serta dari *Volkschool* ditambah *Vervolgschool*, mendapat kesempatan masuk kedalam sistem pendidikan anak-anak Belanda (Poesponegoro & Notosutanto, 2009: 110). Pemerintah kolonial Belanda menyiapkan mekanisme berupa Sekolah Schakel sebagai pendidikan penyetaraan. Para murid di Sekolah Schakel diajarkan pelajaran bahasa Belanda dan tata krama model Eropa. Sekolah Schakel sayangnya hanya diperuntukan untuk anak-anak Indonesia tertentu yang terpilih.

Pendidikan pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda sangat dekat dengan kepentingan-kepentingan politik saat itu. Kebijakan pendidikan banyak disusun berlandaskan alasan-alasan politik yang cenderung menguntungkan pihak pemerintah kolonial Belanda. Pendekatan politik yang digunakan dalam dunia pendidikan saat itu sebenarnya juga bermuara pada kepentingan ekonomi Belanda. Sudah menjadi rahasia umum jika kepentingan negara penjajah adalah mengeksploitasi kekayaan ekonomi negara jajahan. Pandangan yang demikian juga dapat ditemukan dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Nasution (1995: 20) menjelaskan beberapa sifat atau ciri-ciri umum pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sifat atau ciri-ciri umum tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Gradualisme**

Penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat minim. Pendidikan baru diberikan pada tahun 1848 karena desakan kebutuhan pegawai rendah pemerintah. Pemerintah Kolonial terkesan enggan memberikan akses pendidikan pada masyarakat Indonesia karena takut dapat merangsang pemberontakan. Sebaliknya, pendidikan bagi anak-anak Belanda sangatlah diperhatikan. Bahkan mereka mendapatkan akses yang mudah untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi di Negeri Belanda. Keinginan mempertahankan status quo dikalangan orang Belanda berperan dalam gradualisme dalam pendidikan di Hindia Belanda. Ada keinginan menjaga agar anak-anak Belanda lebih maju dari pada anak-anak Indonesia dengan membatasi kesempatan belajar orang Indonesia.

Masalah ini muncul salah satunya adalah karena masalah pendanaan. Biaya pendidikan untuk jutaan anak-anak Indonesia bisa mencapai jutaan gulden juga. Pemerintah kolonial saat itu masih enggan mengeluarkan biaya sebesar itu untuk keperluan pendidikan terutama pendidikan anak-anak Indonesia. Masalah lain muncul dari keadaan kultural masyarakat. Urusan penduduk secara langsung

diserahkan kepada penguasa lokal setempat. Sayangnya, para penguasa lokal belum banyak berbuat dalam bidang pendidikan. Penduduk sendiri juga tidak menunjukkan banyak perhatian terhadap pendidikan yang diberikan oleh Belanda.

2. Dualisme

Dualisme menjadi ciri yang dominan dalam pendidikan di Hindia Belanda. Setiap golongan rasial dan sosial di Hindia Belanda memiliki sekolah yang berbeda. Terdapat dua kategori dalam pendidikan di Hindia Belanda yaitu pendidikan Belanda dan pendidikan Pribumi. Masing-masing memiliki kurikulum dan sistem pembelajaran yang berbeda. Soal pendidikan lanjutan, pendidikan Belanda memberikan ruang yang luas untuk pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan pribumi sebaliknya sangat sulit dan berbelit-belit jika ingin melanjutkan pendidikan.

Dualisme juga muncul dalam masing-masing kategori dalam pendidikan di Hindia Belanda. Anak Belanda dari status sosial tinggi memiliki sekolah khusus yang tidak dapat dimasuki oleh anak Belanda dari status sosial rendah. Perbedaan yang sama juga terdapat dalam pendidikan anak pribumi. Anak-anak Indonesia yang tinggal di desa bersekolah di *volkschool* sedangkan yang tinggal di kota dapat bersekolah di Sekolah Kelas Dua. Dualisme dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda ini penyebab utamanya adalah status rasial dan sosial seseorang.

3. Kontrol Sentral

Pemerintah Kolonial Belanda memegang peranan utama dalam berbagai masalah pendidikan di Hindia Belanda. Hampir semua permasalahan besar sampai urusan yang kecil harus melewati persetujuan Gubernur Jendral atau Direktur Pendidikan sebagai mandatorinya. Selama memerintah di Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda dipimpin oleh Seorang Gubernur Jendral. Selama melaksanakan tugasnya, Gubernur Jendral dibantu oleh pejabat-pejabat lain dibawahnya termasuk dalam urusan pendidikan. Sistem pemerintahan yang berpusat pada Gubernur Jendral berpengaruh pada sistem pendidikan yang sentralistik. Akibat sistem pendidikan yang demikian, para guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung dalam pendidikan. Segala permasalahan sekolah, kurikulum, buku pelajaran, persyaratan guru, jumlah sekolah, jenis sekolah, pengangkatan guru ditentukan oleh pemerintah pusat.

4. Penyedia Pegawai

Sekolah pertama yang diselenggarakan untuk anak-anak Indonesia sebenarnya hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendah pemerintah. Sasarannya adalah anak-anak priyayi dari golongan sosial yang tinggi. Pemerintah Kolonial Belanda terkesan terpaksa menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia karena kebutuhan administratifnya. Perkembangan selanjutnya, meningkatnya kebutuhan pegawai dan juru tulis menjadi faktor utama perluasan horisontal pendidikan terutama bagi anak-anak Indonesia. Secara vertikal, pendidikan berkembang karena kebutuhan pegawai dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Hampir sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda bertujuan agar anaknya dapat menjadi pegawai pemerintah. Posisi pegawai pemerintah dalam strata sosial masyarakat waktu itu sangat dihargai. Pegawai pemerintah adalah pendukung utama berlangsungnya pemerintahan kolonial. Hampir seluruh orang Belanda bekerja sebagai pegawai pemerintah. Ada stigma yang timbul dikalangan orang Indonesia bahwa bekerja seperti orang Belanda berarti setara dengan mereka. Hal inilah yang mendorong banyak priyayi kelas rendah menempuh pendidikan Belanda sebagai tangga sosial mereka.

5. Prinsip Konkordansi

Prinsip konkordansi bertujuan mengatur sekolah-sekolah di Hindia Belanda memiliki kurikulum dan standar pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah di Negeri Belanda. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah perpindahan

murid-murid dari Hindia Belanda ke sekolah-sekolah di Negeri Belanda. Sekolah-sekolah Belanda di Indonesia mencapai hasil pendidikan yang baik seperti di negeri Belanda. anak-anak Indonesia lulusan sekolah Belanda tidak mendapatkan banyak kesulitan saat melanjutkan sekolah di Belanda. berkat prinsip konkordansi, lulusan HBS di Indonesia dapat melanjutkan sekolah di universitas Belanda tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Penerapan prinsip ini telah berhasil mengangkat pendidikan anak-anak Indonesia menjadi lebih baik.

6. Tidak Adanya Organisasi Sistematis

Sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki permasalahan yang unik. Masalahnya terletak pada ketidak sistematisan sistem persekolahannya. *Volkschool* untuk anak desa, Sekolah Kelas Dua untuk anak kota, Sekolah Kelas Satu untuk anak priyayi, dan sekolah Belanda seperti HIS untuk anak-anak Belanda. Sistem pendidikan yang sistematis hanya disediakan pada pendidikan khusus anak-anak Belanda. Sistem pendidikan ini memiliki organisasi pendidikan yang lengkap sesuai dengan sistem pendidikan di negeri Belanda. Anak-anak pribumi yang ingin melanjutkan sekolah di Negeri Belanda wajib mengikuti pendidikan anak-anak Belanda. Cara lain adalah dengan mengikuti sekolah penyetaraan yang seleksi masuknya sangat ketat dan sulit. Konsekuensinya adalah sangat sedikit anak-anak Indonesia yang mangingnam pendidikan tinggi.

Pendidikan modern yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda nampaknya belum sesuai dan memadahi terutama bagi anak-anak Indonesia. Melihat keadaan ini, banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan swasta. Lembaga-lembaga pendidikan swasta ini diselenggarakan oleh orang Indonesia sendiri yang telah merasakan pendidikan yang lebih maju. Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa dengan membawa ide penyatuan Pendidikan dan Kebudayaan. K.H Ahmad Dahlan dari kalangan ulama melakukan reformasi pendidikan islam dengan mendirikan Madrasah Muhammadiyah. Semangat pendidikan kaum perempuan terwakili oleh gerakan pendidikan yang diinisiasi oleh R.A Kartini dan R Dewi Sartika dengan sekolah khusus perempuannya (Abdul, 2020; Ismail et al., 2021; Jayudha & Darmawan, 2020). Pendidikan yang berlandaskan kemandirian tercermin dalam ruang pendidikan INS Kayutanam pimpinan Mohammad Sjafei di Sumatra Barat. Hampir sama dengan Mohammad Sjafei, Dr Setyabudhi (E.F.E Douwes Deker) mengikuti jejak kawannya di Yogyakarta dengan mendirikan Ksatrian Instituut. Semua sekolah swasta/partiklir ini hadir memberi warna baru dalam dunia pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

**C. Sejarah Berdirinya Ksatrian Institut**

Ksatrian Instituut berawal dari sebuah sekolah rendah partikelir milik seorang Belanda bernama Ny. H.E. Mater-Elenvass. Sekolah itu terletak di Jalan Kebon Kelapa Nomor 17 Bandung. Sepulang dari pengasingan di Belanda, Dr. Danudirdjo Setyabuddhi (E.F.E. Douwes Dekker) ingin mengabdikan diri sebagai guru di sekolah Ny. Mayer. Dr. Setyabuddhi kemudian mengirimkan surat kepada Gubernur Jendral untuk memberitahukan maksudnya itu serta meminta pertimbangan kepada pemerintah Hindia Belanda. Residen Bandung sempat merasa keberatan dengan maksud Dr. Setyabuddhi karena suami Ny. Mayer tercatat sebagai seorang komunis. Gubernur Jendral sendiri memiliki pendapat yang berbeda. Bagi Gubernur Jendral, “lebih baik kepada orang yang sedang gelisah seperti Douwes Dekker diberi kesempatan kerja tetap bagi penghidupannya daripada ia, karena dihalangi kesempatannya, akan lebih condong untuk rakyat” (Poesponegoro, 2009: 288). September 1922, Dr. Setyabuddhi mendapat ijin sebagai guru pada sekolah Ny. Mayer.

Sekolah Ny. Mayer kemudian berubah menjadi Institut Pengajaran Priangan dari Perkumpulan Pengajar Rakyat di Bandung (*Preanger Instituut van de Vereeniging Volksonderwijs*). Dr. Setyabuddhi menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah itu,

setingkat dengan kepala MULO. Sekolah itu didirikan untuk memberi kesempatan pendidikan yang lebih baik dan luas pada anak-anak bumiputra. Kurikulum sekolah disesuaikan dengan kurikulum di ELS (*Europese Lagere School*). Dr. Setyabuddhi secara pribadi tidak setuju dengan kurikulum yang diterapkan di ELS karena dianggap mementingkan kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan melupakan kepentingan masyarakat bumiputra. Meskipun demikian, Dr. Setyabuddhi terpaksa menggunakan kurikulum yang serupa dengan ELS. Desakan dari orang tua murid untuk menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar menjadi pertimbangan Dr. Setyabuddhi. Orang tua murid merasa pada saat itu kebutuhan berbahasa Belanda menjadi sangat penting terutama dalam bidang ekonomi. Institut Pengajaran Priangan sempat ditutup dalam rangka memperingati hari meninggalnya Pangeran Diponegoro. Inisiatif peringatan meninggalnya Pangeran Diponegoro digagas oleh Taman Siswa.

November 1924, Institut Pengajaran Priangan berubah nama menjadi menjadi yayasan yang bernama *School Vereeniging Het Ksatrian Instituut*. Tujuan pendidikan *Ksatrian Instituut* dirumuskan dalam sebuah Instruksi Sekolah sebagai berikut:

*“dalam arti susila, pengajaran selalu bertalian dengan kegembiraan hidup dan diarahkan untuk memperkuat dan menciptakan rasa harga diri, pengembangan inisiatif dan kesadaran kemerdekaan, meninggikan peradaban sendiri, satu dan lainhal berdasarkan rasa cinta kepada lingkungannya, tanah air, dan bangsanya sendiri dan kemudian kepada kemanusiaan. Dalam arti kecerdasan otak, pengajaran terutama ditujukan untuk menmbahkan pengetahuan tentang sumber-sumber bantu bagi perkembangan tanah air sendiri dan tentang kemungkinan-kemungkinan membangun apa yang berguna dan terhormat dimasa mendatang. Pelaksanaan pengajaran akan bebas dari pengaruh agama dan rencana ketata negaraan partai politik (Poesponegoro, 2009: 289).”*

Berdasarkan kutipan tersebut, *Ksatrian Instituut* bertujuan mengadakan pembelajaran yang berdasarkan nasionalisme dan pendidikan ke arah manusia yang berpikiran merdeka. Dr. Setyabuddhi, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada seorang kawannya di Karawang, menjelaskan bahwa “yang terpenting di dalam sekolahku ialah adanya rasa harga diri manusia dan kepercayaan kepada diri sendiri diajarkan sebagai bagian pendidikan untuk membina watak. Batin sekolahku itu akan berbeda dengan sekolah-sekolah penjajah (Poesponegoro, 2009: 289).” Berdasarkan tulisan tersebut, Dr. Setyabuddhi ingin menanamkan kesadaran nasional dan jati diri bangsa kepada para muridnya. Dr. Setyabuddhi memiliki visi untuk menyelenggarakan pendidikan yang sama sekali berbeda dengan pendidikan di sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda.

*Ksatrian Instituut* yang sebelumnya berlokasi di bekas sekolah Ny. Mayer di Bandung, dipindahkan ke daerah Kebonjati. Tanggal 16 November 1926 *Ksatrian Instituut* mendapatkan surat persetujuan dan pengakuan sebagai badan hukum dari Gubernur Jendral Hindia Belanda. Susunan pengurus *Ksatrian Instituut* sesuai dengan pasal 7 Anggaran Dasar terdiri dari seorang Ketua, Seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Jabatan sebagai ketua dipegang oleh Dr. Setyabuddhi dan istrinya, Johanna Petronella Douwes Dekker, menjabat sebagai Sekretaris. Selain Dr. Setyabuddhi dan Istri, Pengurus-pengurus *Ksatrian Instituut* antara lain G.M.G. Douwes Dekker, P.Ph.P. Westerloo, J.E. Folkens, Dr. Tjipto Mangunkusumo, A. Coomans, dan P.E. Dakter (Firmnasyah, 2013: 61).

#### **D. Pendidikan di Ksatrian Instituut**

*Ksatrian Instituut* bermaksud menyelenggarakan pendidikan yang berbeda dengan kebanyakan sekolah pemerintah Hindia Belanda. *Ksatrian Instituut* berusaha untuk mengalihkan tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dr. Setyabuddhi menilai bahwa sekolah pemerintah Hindia Belanda hanya menimbulkan pengangguran dan hanya merupakan persiapan menjadi pegawai pemerintahan. Kemampuan kerja nyata untuk membangun masyarakat dengan pengetahuan ekonomi dan budaya merupakan tujuan dari *Ksatrian Instituut*. Lulusan *Ksatrian Instituut* diharapkan menjadi manusia yang mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka harus mampu

membangun bangsanya dan menjadi tulang punggung masyarakat karena kedudukannya sebagai golongan terpelajar. Untuk mencapai tujuan itu *Ksatrian Instituut* menyelenggarakan berbagai pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah.

Buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah di bawah *Ksatrian Instituut* sebagian besar diterbitkan sendiri secara mandiri. Buku-buku yang diterbitkan oleh *Ksatrian Instituut* salah satunya adalah buku *Scema van de ontwikkeling van het menslijk verkeer op aarde* yang ditulis oleh Dr. Setyabuddhi. Buku itu berisi tentang sejarah peradaban umat manusia sejak zaman kuno. Tulisan Dr. Setyabuddhi lain yang diterbitkan adalah buku *Vluchtig Overzicht van de Geschiedenis van Indonesie, Deel I. Oudheid en Antieke, Deel II. Interval, Deel III. Moderne*. Buku ini merupakan buku sejarah Indonesia yang terdiri dari tiga jilid. Dr. Setyabuddhi juga menulis buku tentang sejarah dunia dengan judul *Wereld-Geschiedenis: Leerboek voor Middelbare Scholen in Indonesia I: Oost Azie*. Buku lain yang diterbitkan *Ksatrian Instituut* adalah buku tata bahasa Jepang yang berjudul *Leerboek van de Japanche Taal*. Buku itu ditulis oleh H. Nagashima B.A. dan M. Sabirin. *Ksatrian Instituut* juga sempat menerbitkan buku-buku bahasa dan buku pelajaran statistika (Firmansyah, 2013: 62). Semua buku terbitan *Ksatrian Instituut* termuat dalam kolom iklan di majalah murid dan orang tua. Majalah murid dan orang tua diterbitkan oleh *Ksatrian Instituut* sejak bulan Agustus 1937 (Poesponegoro, 2009: 293). Majalah ini, selain memuat berita sekolah, juga berisi berita-berita nasional dan internasional.

#### E. Pendidikan Dasar di *Ksatrian Instituut*

*Ksatrian Instituut* awalnya menyelenggarakan pendidikan pada tingkat dasar. Sekolah penyelenggara pendidikan dasar ini dinamakan *Nationale Lagere School* (NLS). Kurikulum yang diterapkan di NLS masih sama dengan kurikulum di Institut Pengajaran Priangan. Perbedaan terletak pada diajarkannya bahasa Inggris mulai kelas 5 sebagai tambahan kepada para murid sebagai persiapan menghadapi masa depan. Kebijakan mengajarkan bahasa Inggris menunjukkan visi *Ksatrian Instituut* yang mendidik murid-muridnya untuk siap bersaing di internasional. Setelah melalui tahap pengembangan dan penyempurnaan, pada tanggal 28 Mei 1931, petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembelajaran di *Nationale Lagere School* berhasil dibuat oleh *Ksatrian Instituut*. Petunjuk dan pedoman itu memberikan gambaran filosofi pendidikan dan tata cara operasional *Ksatrian Instituut*. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pendidikan di lingkungan *Ksatrian Instituut* akan dibebaskan dari pengaruh agama dan politik praktis. *Ksatrian Instituut* menekankan pendidikan yang berbasis semangat nasionalisme.

Kenaikan kelas di *Nationale Lagere School* ditentukan oleh kepala sekolah. Setiap kepala sekolah memiliki kebebasan untuk menaikkan seorang siswa lebih cepat ke kelas berikutnya, atau mentapkan seorang siswa untuk mengulang di kelas yang sama. Bahkan kepala sekolah dapat menurunkan kelas siswanya. Sebagai tambahan, satu tahun pelajaran di *Nationale Lagere School* dan sekolah lain di lingkungan *Ksatrian Instituut* tidak boleh lebih dari 240 hari. Ketentuan itu sudah disesuaikan dengan standar umum sekolah di Belanda (Van der Veur, 2006: 488).

Kebersihan sangat diperhatikan di *Nationale Lagere School*. Gedung sekolah dibangun dengan memperhatikan tingkat kesehatan. Fasilitas lain seperti lapangan untuk upacara dan perpustakaan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Guru selalu menutut siswa untuk mengenakan pakaian rapi dan bergaya eropa. Para guru juga menekankan keberishan pribadi pada siswa seperti dengan memeriksa kebersihan tangan dan kuku. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti meludah sembarangan dan mengigiti pensil dilarang di lingkungan sekolah. Setiap pagi para murid mendapat sarapan pagi yang bergizi di sekolah. Murid-murid *Nationale Lagere School* berada dibawah pengawasan dokter *Ksatrian Instituut*. Guru selalu menutut siswa untuk mengenakan pakaian rapi dan bergaya eropa. Para guru juga menekankan keberishan pribadi pada siswa seperti dengan memeriksa kebersihan tangan dan kuku (Van der Veur, 2006: 489).



*Nationale Lagere School* termasuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Setiap hari guru harus datang 10 menit lebih cepat sebelum pelajaran dimulai dan mengawasi para murid ketika waktu istirahat. Guru juga harus melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap ancaman penyakit menular di antara para siswa. Guru di *Nationale Lagere School* dituntut untuk membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Pembelajaran dengan pendekatan kekerasan dan hukuman harus di hindari guru di *Nationale Lagere School*. Jika ada murid yang melanggar peraturan sekolah, dia akan diberikan tugas khusus sebagai hukumannya dan dipisahkan dari teman satu kelasnya. Hukuman juga bisa berupa penangguhan waktu kepulang sekolah untuk mengerjakan sejumlah tugas (Van der Veur, 2006: 490).

Masalah pembiayaan menjadi salah satu hal penting bagi sebuah sekolah untuk bertahan. Biaya sekolah di *Nationale Lagere School* dibayarkan paling lambat hari kesepuluh setiap bulannya. Bagi murid yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran. Tunggakan pembayaran yang lebih dari satu bulan tidak diijinkan. Kelengkapan sekolah seperti buku-buku dan kebutuhan lainnya disediakan oleh *Ksatrian Instituut* dan tidak dipungut biaya. Para murid hanya diminta mengembalikannya kepada yayasan dalam keadaan baik (Van der Veur, 2006: 490).

*Ksatrian Instituut* berkembang dengan baik dan mempunyai murid lebih dari 200 siswa. Sejak berbadan hukum, *Ksatrian Instituut* memperoleh kemajuan yang pesat. *Ksatrian Instituut* berhasil mendirikan cabang-cabang antara lain *Nationale Lagere School I* dan *Nationale Lagere School II* di Bandung; *Nationale Lagere School III* di Ciwidey; *Nationale Lagere School IV* di Cianjur; dan *Nationale Lagere School V* di Sukabumi (Firmansyah 2013: 62). Berdasarkan laporan inspeksi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1933, para siswa *Nationale Lagere School* berhasil lulus pada ujian akhir sekolah dasar (Van der Veur, 2006: 488). Hal itu merupakan sebuah prestasi yang sangat baik untuk sekolah partikelir saat itu.

#### F. Sekolah Bisnis, Jurnalistik, dan Keguruan di *Ksatrian Instituut*

*Ksatrian Instituut* mendirikan *Moderne Middelbare Handesel School* (MMHS) atau sekolah menengah dagang modern. MMHS didirikan pada tahun 1932 dengan nama *Nationaal Handels Collegium*. Setelah satu tahun berdiri dengan nama *Nationaal Handels Collegium*, pemerintah Hindia Belanda melarang nama sekolah tersebut dan kemudian diganti nama menjadi *Moderne Middelbare Handesel School*. Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan bagi murid-murid NLS yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dalam lingkungan *Ksatrian Instituut*. Semboyan MMHS adalah *Door de will van onse Volk* yang berarti karena kemauan rakyat dan *Des Volks Toekomst gewijd* yang berarti mengabdikan masa depan rakyat (Firmansyah, 2013: 62). Kedua semboyan itu dapat dimaknai bahwa sekolah itu didirikan oleh rakyat untuk rakyat.

MMHS merupakan sekolah menengah kejuruan dagang. Para murid MMHS diberikan pelajaran psikologi perdagangan, yaitu untuk mengenal pelanggan dan pembeli. Pelajaran teknik perdagangan yang meliputi akuntansi, ilmu perdagangan, ilmu perusahaan, ilmu penjualan, dan ilmu periklanan menjadi mata pelajaran yang khas dalam kurikulum MMHS. Keahlian merumuskan pendapatan dan cara-cara menawarkannya di depan publik menjadi salah satu latihan ketrampilan para murid. Selain itu, para murid juga diajarkan ketrampilan membuat reklame perdagangan. Murid-murid MMHS juga dibekali ketrampilan bahasa seperti bahasa Mandarin dan Jepang. Tamatan MMHS diharapkan dapat membuka hubungan perdagangan dengan China dan Jepang selain melanjutkan pendidikan disana. Termasuk bahasa Inggris sebagai bahasa internasional juga diajarkan pada para murid. Kurikulum di MMHS juga dilengkapi dengan pengetahuan umum tentang individu dan masyarakat yang meliputi sejarah kebudayaan dan perkembangan peradaban (Poesponegoro, 2009: 290).

Pendidikan di MMHS ditempuh dalam waktu tiga tahun. Setelah menempuh tiga tahun pendidikan, lulusan MMHS dapat langsung mencari pekerjaan atau berwira usaha.

Bagi lulusan MMHS yang ingin meneruskan pendidikan dapat melanjutkan studi di pendidikan lanjutan bisnis MMHS. Pendidikan lanjutan bisnis MMHS berlangsung selama dua tahun. Bidang ekonomi dan bisnis menjadi pelajaran utama dalam pendidikan lanjutan ini. Lulusan pendidikan lanjutan bisnis MMHS nantinya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi yang ada di Tokyo, Osaka, Hong Kong, atau Manila. Selain dekat dengan Hindia Belanda, lingkungan di kota-kota itu tidak jauh berbeda. Kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di Rotterdam juga terbuka bagi lulusan pendidikan lanjutan bisnis MMHS (Poesponegoro, 2009: 291).

Ujian akhir menjadi salah satu penilaian kompetensi siswa dan syarat kelulusan seorang murid dari MMHS. Murid yang berhasil lulus dari ujian akhir akan memperoleh salinan daftar pelajaran yang sudah mereka laksanakan dan nilai yang diperolehnya dalam pelajaran itu. Para murid juga mendapatkan sertifikat yang berupa surat rekomendasi yang berisi kemampuan intelektual individu dan keahlian dibidang perdagangan yang dikuasainya. Sertifikat lulusan MMHS juga berisikan rekomendasi dari kepala sekolah tentang posisi pekerjaan apa yang sesuai untuk pemilik sertifikat. Rekomendasi dari kepala sekolah ini berdasarkan hasil observasi kepada murid pemilik sertifikat selama masa studinya (Van der Veur, 2006: 493).

MMHS ketika pertama berdiri hanya membuka dua kelas dengan masing-masing kelas terdiri dari 35 murid dan lima guru. Tiga tahun berjalan MMHS berkembang dengan pesat dimana di tahun ketiganya telah memiliki kurang lebih 227 murid dan 16 guru. Tahun 1936, jumlah murid MMHS turun menjadi 200 murid dan pada tahun 1937 kembali turun menjadi 179 murid. Penurunan jumlah murid ini disebabkan oleh boikot yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan sistem pendidikan baru yang hampir sama dengan sistem pendidikan di MMHS. Pemerintah Hindia Belanda membuka *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang memiliki masa pendidikan tiga tahun. Selain MULO, pemerintah Hindia Belanda juga membuka *Middelbare Handelsschool* (Sekolah Bisnis Menengah) dengan masa pendidikan dua tahun. *Middelbare Handelsschool* hanya bisa dimasuki oleh lulusan dari MULO. Sistem yang demikian sangat identik dengan sistem jenjang pendidikan di MMHS. Kurikulum yang digunakan di kedua sekolah pemerintah Hindia Belanda itu hampir sama dengan kurikulum MMHS. Bahkan pemerintah Hindia Belanda memerintahkan *Ksatrian Instituut* tidak menggunakan nama MMHS karena kemiripannya dengan MULO dan *Middelbare Handelsschool* (Van der Veur, 2006: 491).

Biaya pendidikan di MMHS terbilang tidak murah. MMHS didirikan saat perekonomian dunia sedang mengalami depresi. Depresi ekonomi dunia itu juga berdampak sampai ke Hindia Belanda. Hal itu yang menjadi salah satu faktor tingginya biaya pendidikan di MMHS. Sejumlah biaya harus dibayarkan pada saat pendaftaran meskipun saat kegiatan sekolah dimulai biaya itu akan dikembalikan. Para murid juga masih diharuskan membayar perlengkapan sekolah. Biaya pendidikan per bulan untuk murid tahun pertama dan kedua sebesar 15 Gulden; untuk murid tahun ketiga sebesar 18 Gulden; dan untuk pendidikan lanjutan dua tahun dikenai biaya 24 Gulden. Biaya rumah kos di Bandung saat itu sekitar 15 Gulden per bulang sudah termasuk biaya makan dan cuci pakaian. Jika dihitung, biaya yang dikeluarkan seorang murid MMHS selama periodi 10 bulan/satu periode jenjang pendidikan berkisar antara 300-390 Gulden belum termasuk biaya perlengkapan sekolah. Jumlah tersebut termasuk tinggi untuk biaya pendidikan saat itu. Bisa dikatakan bahwa murid MMHS masih didominasi anak-anak dari pegawai pemerintah Hindia Belanda baik dari golongan Eropa, Indo, maupun Bumiputra (Van der Veur, 2006: 491).

*Ksatrian Instituut* selanjutnya mendirikan sekolah keguruan yang bernama *Nationale Opleidingsschool voor Zelfstanding Onderwijerz* (NOZO) atau Sekolah Pelatihan Nasional Guru Independen. NOZO mulai dibuka pada tanggal 1 Agustus 1935. Latar belakang didirikannya NOZO oleh *Ksatrian Instituut* dapat dilihat dalam pernyataan Dr. Setyabuddhi sebagai berikut.

“Jika kelak sekolah-sekolah liar telah merebut masa depan pengajaran, seperti yang telah direbutnya sekarang, pemerintah akan meminta syarat-syarat lebih tinggi bagi guru-guru. Pemerintah akan bertindak untuk kepentingan pengajaran, yang juga merupakan kepentingan kita. Kita akan menyambut bila hal itu terjadi. Sekarang belum terjadi, waktunya belum tiba untuk itu. Akan tetapi, kelak akan terjadi juga. Kita harus melihat ke depan. Persiapan yang telah dilakukan harus mampu menyiapkan guru-guru lulusan sekolah kita sebagai guru yang telah mendapatkan pendidikan baik serta berwenang. Dalam jumlah besar, mereka harus siap memegang kewajiban memenuhi kebutuhan pengajaran. Apa yang telah kita berikan, harus dilipatkan sepuluh kali kepada rakyat (Poesponegoro, 2009: 292).”

NOZO merupakan langkah persiapan menghadapi perubahan kebijakan pendidikan dalam bidang keguruan. Dr. Setyabuddhi memperkirakan bahwa tuntutan kompetensi bagi guru akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. NOZO diharapkan menghasilkan calon-calon guru yang berkualitas dan mendapatkan lisensi dari pemerintah Hindia Belanda. Para calon guru lulusan NOZO akan menjadi agen untuk memperluas pendidikan bagi bumiputra.

NOZO didirikan untuk menampung lulusan MMHS yang berminat menjadi guru. Selain menerima murid dari lulusan MMHS, NOZO juga menerima murid dari lulusan sekolah pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan di NOZO dilaksanakan secara intensif selama satu tahun. Prinsip pendidikan di NOZO adalah belajar dengan melakukan. Pendidikan keguruan di NOZO lebih banyak diarahkan pada mengamati guru secara langsung sambil para murid membuat rancangan pembelajarannya sendiri. Teori pedagogik dan media pembelajaran menjadi menjadi materi pelajaran utama di NOZO. Pelajaran lain yang diajarkan di NOZO adalah kesenian seperti menggambar, membuat kerajinan tangan, dan musik. Pembelajaran di NOZO diarahkan untuk memberikan pengetahuan baik secara teori maupun praktis pada para muridnya. Tujuannya agar para murid memiliki keberanian dan kepercayaan diri setelah lulus dan menjadi guru (Van der Veur, 2006: 491).

NOZO mengusung semboyan “Untuk tiap-tiap desa sekolahnya sendiri”. Para murid NOZO selain dibekali pengetahuan keguruan juga dibekali pengetahuan umum ditambah dengan ilmu perdagangan dan ilmu hubungan masyarakat. Murid-murid di NOZO dipersiapkan untuk mengajar dan mendirikan sekolah-sekolah partikelir Indonesia. Para murid diajarkan bahwa yang menjadi tujuan utama seorang guru bukanlah jabatan melainkan sekolah itu sendiri. Mereka harus mampu masuk ke pelosok dan mendirikan sekolah di desa-desa. Cara membangun sekolah tanpa modal menjadi salah satu pengetahuan yang diajarkan. Selama mengajar dipelosok, peserta pendidikan guru dianjurkan untuk aktif melakukan kegiatan perdagangan. Mereka harus menguasai akuntansi, manajemen, administrasi, dan menggali sumber-sumber keuntungan bagi sekolahnya. Mendirikan sekolah di desa-desa sangat ditekankan dalam pendidikan di NOZO.

*Ksatrian Instituut* juga mendirikan sekolah jurnalistik bernama *Middelbare Journalisten School* (MJS) atau Sekolah Mengengah Jurnalistik. MJS merupakan pendidikan lanjutan bagi lulusan MMHS atau lulusan sekolah setingkat yang memiliki ketertarikan pada dunia jurnalistik. MJS dibuka atas dasar keprihatinan *Ksatrian Instituut* terhadap keadaan pers bumiputra di Hindia Belanda. Hindia Belanda saat itu memiliki banyak surat kabar Indonesia yang baik. Sayangnya surat-surat kabar Indonesia itu kekurangan jurnalis-jurnalis Indonesia yang baik. Lulusan dari MJS diharapkan mampu menutupi kekosongan itu. Sebagai jurnalis yang menggunakan bahasa sendiri (Indonesia), serah memiliki pengetahuan ekonomi dan budaya, para lulusan jurusan ini akan mendapat kedudukan dan peran penting dalam pers bumiputra. Para murid di MJS sangat aktif dalam kegiatan jurnalistik di lingkungan *Ksatrian Instituut*. Karya-karya jurnalistik siswa dapat ditemukan di *Erste Oogst*, sebuah surat kabar lembaran yang diterbitkan dibawah *Ksatrian Instituut*. Murid-murid yang banyak berkontribusi di *Erste Oogst* antara lain R.M. Hoedojo Hoeksamadiman, Dachlan Loebis, Tan Tiet Shian, dan B.M. Diah. Pelajaran yang

diajarkan di MJS tidak hanya seputar jurnalistik, tetapi juga pelajaran sejarah nasional Indonesia; pelajaran bahasa asing seperti bahasa Jepang; dan juga ilmu perdagangan (Van der Veur, 2006: 496).

## Simpulan

Pendidikan di sekolah-sekolah milik yayasan Ksatrian Instituut memberikan warna yang menarik dalam sejarah pendidikan Indonesia. Seperti kebanyakan sekolah partikelir di jamannya, sekolah-sekolah Ksatrian Instituut menerapkan sistem yang berbeda dengan sekolah yang dikelola pemerintah Hindia-Belanda. Berbagai macam model sekolah dikembangkan oleh Ksatrian Instituut berdasarkan visi dan tuntutan jaman saat itu. Pendidikan ketreampilan khususnya dalam kewirausahaan sangat menonjol dalam pendidikan di Ksatrian Instituut. Hal itu diwujudkan dengan didirikannya MMHS sebagai sekolah perdagangan untuk mendidik para calon wirausahawan bumiputra. Sayangnya, sebagai sekolah yang ditujukan untuk kalangan bumiputra, akses pendidikan ke Ksatrian Instituut cukup sulit terutama soal biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan murid di Ksatrian Instituut sebageian besar berasal dari anak-anak dari golongan menengah atas. Untuk mengatasi hal ini, Ksatrian Instituut mendirikan sekolah guru yang bernama NOZO. Lulusan NOZO memiliki kompetensi untuk mendirikan dan mengelola sekolah selaian menjadi seorang guru. Dalam pers bumiputra, Ksatrian Instituut juga memiliki perannya tersendiri. Sekolah jurnalistik MJS milik Ksatrian Instituut telah melahirkan jurnalis-jurnalis berkompeten dalam mewarnai duni pers bumiputra. Salah satu lulusan MJS yang terkenal dalam dunia pers bumiputra adalah B.M. Diah. Upaya yang dilakukan oleh Ksatrian Instituut dapat diartikan sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. R. (2020). Ibu Sebagai Madrasah Bagi Anaknya: Pemikiran Pendidikan RA Kartini. *Journal of Islamic Education Policy*, 5(2).
- Ahmadi, A & Uhbiyat, N. (2015). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan pada masa pemerintah kolonial di hindia belanda tahun 1900-1930. *Jurnal Artefak*, 7(1), 21–30.
- Afdhal, A., Manuputty, F., & Ramdhan, R. M. (2022). Pendidikan developmentalisme moh. sjafei: membangun konsep pendidikan berkebudayaan di ins kayutanam (1928-1969). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(3), 130–139.
- Dewantara, K. H. (1967). Ki hadjar dewantara. *Jogjakarta: Majelis Leluhur Taman Siswa*.
- Dewantara, K.H. (2004). Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Fachrurozi, M. H. (2019). Politik etis dan bangkitnya kesadaran baru pers bumiputra. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 2(1).
- Firmansyah, A.B. (2013). *Perjuangan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker Dari Politik Menuju Pendidikan 1913-1941*. Jurnal AVATARA, Vol 1, No. 1, 57-63.
- Hasbullah. (2011). Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ismail, P., Hasan, S., Syaflin, H., Karimuddin, K., Imam, A., Muhammad, F. I., Kartini, K., & Desi, A. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*.
- Jayudha, I. A., & Darmawan, W. (2020). Pendidikan bagi perempuan indonesia: perjuangan raden dewi sartika dan siti rohana kudas (1904-1928). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 9(2), 161–174.
- Marjanis, M. (2021). Relevansi konsep merdeka belajar dengan nilai-nilai filosofis pendidikan di SMA INS Kayu Tanam. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 4(2), 419–426.
- McCowan, T. (2023). The crosscutting impact of higher education on the Sustainable Development Goals. *International Journal of Educational Development*, 103, 102945. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102945>
- Moleong, L. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Nasution, S. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poesponegoro, M.J. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Perkasa, R. D., Dora, N., & Melinda, C. (2021). Pelaksanaan Penanaman Nilai Pendidikan Karakter di SMA Bertalenta INS Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 754–760.
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan pada masa pemerintahan kolonial belanda di Surabaya tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya at 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20–34.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laks BangMediatama.
- Sukarjo, M. & Komarudin, U. (2009). *Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(1), 12–25.
- Sijpenhof, M. L. (2021). Constructing race in white spaces of Dutch education (1968–2017). *History of Education Review*, 50(2), 115–129. <https://doi.org/10.1108/HER-05-2020-0030>
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403.
- Van Der Veur, Paul W. (2006). *The Lion And The Gadfly: Dutch Colonialism And The Spirit Of E.F.E. Douwes Dekker*. Leiden: KITLV Press.